
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)**

*Implementation Of Gender Mainstreaming Policy Through Integrated Program For
Increasing The Role Of Women Towards Healthy And Prosperous Family (P2wkss)*

¹Euis Risnawati, ²Deddy Mulyadi, ³Edah Jubaedah

¹PKK Kabupaten Purwakarta

^{2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

leuis.ris@gmail.com, demul101@gmail.com, Edahjubaedah@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

ABSTRAK

Article history :

Dikirim :

29-03-2022

Revisi Pertama :

11-12-2024

Diterima :

20-12-2024

Kata Kunci :

*P2WKSS; implementasi;
kebijakan PUG*

Keywords :

*P2WKSS; implementation;
PUG policy*

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan melalui P2WKSS di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta berjalan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor penghambat. Faktor penghambat dari dimensi sumber daya yaitu kurangnya kemampuan warga binaan dalam menerima materi sosialisasi, keterbatasan anggaran dan waktu dari penyelenggara program dari kader binaan, serta mindset warga binaan inginnya serba instan. Dari dimensi Komunikasi masih terdapat ketidakharmonisan komunikasi antar OPD terkait dengan pemerintahan Desa, dari dimensi karakteristik agen pelaksana, karakter agen pelaksana cenderung birokrat. Walaupun pola-pola hubungan didalam birokrat pada umumnya sudah baik, hanya masih terdapat ketidak harmonisan hubungan antar pelaksananya. Dimensi sikap disposisi implementor disesuaikan dengan tupoksi masing-masing pihak pelaksana. Sedangkan dari dimensi lingkungan sosial sudah cukup baik, namun pada umumnya kondisi ekonomi warga binaan masih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah desa secara berkelanjutan, dan membutuhkan pengawasan dan evaluasi setelah program dilaksanakan, serta membutuhkan partisipasi dari pihak swasta.

Abstract

This Article showed that the implementation of women's empowerment policies through P2WKSS in Kertasari Village, Bojong District, Purwakarta Regency was going well, although in its implementation there were still various inhibiting factors. From the aspect of resources, the implementation of this policy is still facing inhibiting factors, namely the incompetence and capability of the inmates' human resources in receiving socialization

materials. The limited budget of the program organizers and the time of the trained cadres, which is caused by the fact that they are still busy with fulfilling their income for the basic needs of daily life. And set from the inmates themselves who want everything to be instant, whatever they work for that day the results must be obtained on the same day. From the aspect of communication, there is still disharmony in communication between OPDs related to village government, the dimensions of the characteristics of implementing agents show that implementing agents have characteristics, the character of implementing agents tends to be bureaucrats, patterns of relationships within bureaucrats are generally good, only there is still disharmony between the implementers. the dimensions of the attitude of the implementor's disposition are adjusted to the main tasks and functions of each implementing party. Meanwhile, from the dimension of the social environment, it is quite good, in general the economic conditions of the inmates still need support and attention from village orders on an ongoing basis, and there is no monitoring and evaluation after the program is implemented, as well as the lack of participation from the private sector.

A. PENDAHULUAN

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Penyebab pertama adalah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum bisa membedakan jenis kelamin dengan gender. Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan, dengan alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari keduanya menyebabkan secara alamiah akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan laki-laki dan perempuan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan melahirkan diskriminasi atau ketidakadilan, yang satu lebih dominan dari pada yang lain. Realita ini mengundang perhatian berbagai kajian yang menarik. Salah satunya, budaya yang memberikan pandangan bahwa anatomi dan fungsi dari semua bagian tubuh laki-laki dan perempuan akan berkonsekuensi pada berbagai psikologisnya, yang mana perempuan lebih banyak memiliki tugas domestik untuk mengurus segala urusan rumah tangga, sedangkan berbeda dengan laki-laki yang dipersiapkan mandiri dengan peran yang lebih besar pada berbagai aspek. Asumsi ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam keluarga, berbangsa, dan bernegara. Perempuan hanya dipaksa menjalankan program, tanpa ditanyakan skala prioritas dan kebutuhan. Program yang diciptakan bisa saja asal menyesuaikan alokasi anggaran.

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan. Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan miskin menyebabkan terjadinya peningkatan. Pemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, kurangnya akses ke

pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga dapat mendorong perempuan ke dalam situasi rawan pada eksploitasi seksual.

Dilihat dari berbagai isu tersebut terutama permasalahan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) pemerintah membuat suatu solusi kebijakan. Salah satunya adalah melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perempuan sebagai masyarakat yang partisipatif dan sejahtera serta mendukung terciptanya kesetaraan gender. P2WKSS merupakan Program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan pada aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli terutama bagi keluarga miskin di desa/kelurahan. Peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria perlu ditingkatkan agar mampu memberikan sumbangan yang besar dalam berbagai bidang pembangunan di daerah.

Program P2WKSS merupakan program peningkatan pemberdayaan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Program ini dilandasi Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa "laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola pembangunan".

B. METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan usaha untuk mengetahui, menguji, mengembangkan suatu kebenaran pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah digunakan untuk membatasi agar sebuah penelitian terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ilmiah ini biasa disebut metode penelitian sehingga metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010: 2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung berbeda dengan kuantitatif yang lebih mengedepankan perhitungan, presentase serta perhitungan statistik lainnya, sedangkan penelitian kualitatif lebih menunjukkan segi alamiah, etnografik, lebih melihat kepada fenomenanya.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011: 54). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Di dalam metode penelitian kualitatif ada dua hal pokok yakni naturalistik atau alamiah serta fenomena yang menjadi kajian untuk diteliti. Sedangkan metode ilmiah ialah penggunaan proses berfikir deduktif-induktif untuk memecahkan masalah. Penelitian kualitatif mengembangkan pendekatan ilmiah induktif sebagai proses berpikir dalam penarikan kesimpulan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak.

Strategi operasional dititikberatkan pada pemanfaatan kelembagaan masyarakat yang ada di daerah, bentuk swadaya yang ada di masyarakat (jimpitan/perek/ arisan uang atau barang, bantuan

partisipasi dan lain-lain), mekanisme swadaya yang ada di masyarakat; model pemasyarakatan yang tepat guna.

P2WKSS mempunyai tujuan secara umum yaitu untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan status kesehatan perempuan, meningkatkan status pendidikan perempuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat, meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program peningkatan peranan masyarakat yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Tujuan khusus dari program terpadu P2WKSS adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan status pendidikan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Setiap program pemerintah memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga program terpadu P2WKSS. Adapun penentuan daerah binaan dari program ini dilaksanakan setiap tahun sekali dengan pengesahan melalui SK (Surat Keputusan) Bupati Purwakarta.

Penelitian tentang implementasi kebijakan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) ini dilakukan karena adanya fenomena-fenomena yang ada di lapangan khususnya di Desa Kertasari. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana implementasi kebijakan tentang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera.

1. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui P2WKSS di Kabupaten Purwakarta dari dimensi standar dan tujuan kebijakan idealnya harus jelas dan teratur dan isi dari kebijakan tersebut mampu dimengerti dan dipahami oleh implementor. Dari hasil penelitian pada program P2WKSS di desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta standar dan tujuan kebijakan sudah jelas dan implementasi program sesuai dengan SOP, hanya waktu pelaksanaannya saja yang tidak sesuai jadwal, hal ini terjadi karena adanya keterlambatan anggaran yang dibutuhkan.

2. Dimensi Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi program P2WKSS di Desa Kertasari telah cukup baik. Dari segi sumber daya manusia, pihak yang melaksanakan program P2WKSS di Desa Kertasari ialah Dinas Sosial P3A, Kepala Desa kertasari, Camat Bojong, Ketua Tppkk desa kertasari, Ketua Tppkk kecamatan Bojong, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan, Balai Latihan Kerja, yang pada masing-masing Pokja memiliki bidang tugas yang berbeda sehingga pada masing-masing pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Pokja yang berbeda pula.

Namun dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (perempuan) yang berpartisipasi terhadap pelaksanaan program P2WKSS, masyarakat desa Kertasari yang lainnya sebagai pelaksana program belum dapat dikatakan baik, dikarenakan kurangnya keaktifan dalam mengikuti pertemuan, namun hal tersebut dapat diatasi karena sudah tertopang oleh pembina program P2WKSS. Dari segi sumber daya finansial belum tersedia anggaran dengan baik dari kelurahan maupun bantuan dari berbagai pihak, walaupun belum cukup untuk menunjang berjalannya keseluruhan kegiatan program P2WKSS. Selain itu dari segi

sumber daya fasilitas sarana dan prasarana telah tersedia pula serta telah tersedianya alat-alat produksi walaupun belum semua alat-alat produksi dimiliki serta masih sering meminjam alat milik orang lain.

Dapat dilihat dari dimensi sumber daya berdasarkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui Program P2WKSS yang dilaksanakan di desa Kertasari tidak memadai. Hal tersebut baik dilihat dari sumber daya manusianya terutama dari SDM warga binaan maupun dari sumber daya finansial yang dirasakan masih kurang karena bantuan dari lintas sektor OPD masih dirasa kurang masih jauh dari kebutuhan yang diharapkan.

3. Dimensi Komunikasi antar Organisasi

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti katakan bahwa dilihat dari dimensi komunikasi dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui program P2WKSS di desa Kertasari kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta masih dirasakan tidak baik. Karena apa yang diharapkan dari standar kebijakan tidak berhasil dilaksanakan secara berkelanjutan. Komunikasi dari Dinsos P2A sebagai pemangku program yang dilaksanakan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan Desa dan kurang harmonisnya hubungan Kepala desa dengan PLKB juga menghambat tujuan yang diharapkan.

4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, sehingga Program P2WKSS bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang jika dikelola (memiliki manajemen pengelolaan) yang baik. Prinsip dan karakteristik dasar Program P2WKSS menjadi landasan dalam menetapkan skema atau pendekatan manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan, pengembangan Program P2WKSS.

Para pelaksana Program P2WKSS kebanyakan dari aparat pemerintahan yang berarti karakteristik pelaksanaannya adalah birokrat yang artinya Perilaku birokrasi merupakan interaksi antara individu dalam organisasi lingkungannya, karena perilaku birokrasi ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi. kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Hal ini bisa berdampak baik pada aspek penyelenggaraan kegiatan Program P2WKSS yaitu dengan adanya pengembangan kemampuan usaha, namun juga perlu adanya pengawasan, pengendalian dan koordinasi dari pemerintah agar program-program pada P2WKSS ini bisa sesuai dengan yang diharapkan.

5. Dimensi Sikap atau Kecenderungan Pelaksana

Dalam melaksanakan kebijakan, kecenderungan atau sikap implementor dilihat dari beberapa unsur diantaranya kognisi tentang kebijakan, tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pelaksana Program P2WKSS memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan yang tertuang pada Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 463/kep.509-dinsosp3a/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Desa Kertasari Kecamatan Bojong Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan informasi terkait dengan sikap/kecenderungan pelaksana program P2WKSS yaitu pelaksana program P2WKSS belum sepenuhnya mengetahui isi dari kebijakan. Dalam hal ini berbagai dinas terkait belum berhasil mensosialisasikan terkait tujuan, pengembangan dan pemeliharaan hasil dari kegiatan program P2WKSS terutama di tingkat di tingkat desa/kecamatan.

6. Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan dari dimensi sikap dan kecenderungan pelaksana secara idealnya para pelaksana memiliki pemahaman terhadap isi kebijakan program P2WKSS demi tercapainya tujuan dan dapat membangun kerjasama tim pelaksana agar program ini bisa dikembangkan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan sebagian besar pelaksana belum memahami isi dari kebijakan dan program P2WKSS ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana program di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta belum berhasil mensosialisasikan tujuan program ini.

Implementasi kebijakan dari dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik secara idealnya harus bisa mengembangkan potensi masyarakatnya melalui minat wirausaha dan adanya inovasi-inovasi di dalam mengembangkan pembangunan masyarakatnya melalui lingkungan sosial, sumber daya ekonomi dan politik. Hasil penelitian dari program P2WKSS di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa partisipatif masyarakat secara umumnya masih kurang optimal, pemberdayaan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial masih kurang, sehingga masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih meluas agar tujuan dari program bisa tercapai.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui Program P2WKSS di desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, berdasarkan enam dimensi yang diteliti menunjukkan telah terlaksana dengan baik, dan tercapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran program, hanya dalam pelaksanaan penelitian masih terdapat faktor penghambatnya, hal ini bisa dilihat berdasarkan penelitian yang dipakai peneliti yaitu dengan teori model dari van meter dan van horn. Berdasarkan dimensi standar dan sasaran kebijakan cukup baik dan dilaksanakan sesuai standar yang ada dan tepat sasaran. Dimensi sumber daya terlaksana cukup baik namun sumberdaya manusia masih memerlukan pembinaan dan sumber daya finansial yang masih kurang dan bantuan yang kurang tepat sasaran. Dimensi komunikasi antar organisasi telah terlaksana namun koordinasi pemangku kepentingan terkait masih kurang dan kurang terjalin harmonis. Dimensi karakteristik agen pelaksana menunjukkan agen pelaksana memiliki karakteristik, karakter agen pelaksana cenderung birokrat pola-pola hubungan didalam birokrat pada umumnya sudah baik, hanya masih terdapat ketidak harmonisan hubungan antar pelaksananya. dimensi sikap disposisi implementor disesuaikan dengan tupoksi masing-masing pihak pelaksana. Sedangkan dari dimensi lingkungan sosial sudah cukup baik, pada umumnya kondisi ekonomi warga binaan masih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintahan desa secara berkelanjutan, dan dari segi politik tidak ada yang turut didalamnya.
2. Faktor penghambat pada implementasi Program P2WKSS di desa Kertasari yaitu, pihak pelaksana terutama Bidang Pemberdayaan Perempuan DinsosP2A masih kurang optimal, dalam pelaksanaan dan pemahaman program P2WKSS, kurangnya komitmen Pemerintah kepada Kepala desa selaku pelaksana dan pembina program tingkat bawah selain itu koordinasi dan komitmen Dinas terkait masih kurang karena tidak ada jadwal yang dilakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dan pembinaan setelah program P2WKSS itu selesai dilaksanakan.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak penyelenggara program P2WKSS, khususnya koordinator program yaitu pada bidang pemberdayaan perempuan dan pemerintahan terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan, DPMD, DP3AKB, INDAG dan yang lainnya agar lebih meningkatkan dan mengintensifkan sosialisasi tentang program dan kegiatan yang dilakukan.
2. Untuk mengatasi keterbatasan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program, diperlukan melibatkan pihak diluar pemerintah baik swasta maupun organisasi yang tidak dibentuk oleh pemerintah (LSM), termasuk juga dalam rangka pendampingan, pasca pelaksanaan program P2WKSS di lokasi sasaran.
3. Peningkatan pemahaman aparatur, khususnya para pengambil kebijakan dan pelaksana fungsi koordinatif, sehingga semakin meluas perhatian pada peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, terlebih pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan program/kegiatan sektoral pendukung program P2WKSS, dalam bentuk penambahan jumlah peserta pemberdayaan..

REFERENSI

- Astuti, P. 2017. Peluang PNS Perempuan dalam Memperoleh Jabatan Struktural: Studi Kualitas Kesetaraan Gender di Pemerintah Kota Semarang. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 68–83.
- Astri Lestari, Sahadi Humaedi, Binahayati Rusyidim Partisipasi Perempuan dalam Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di RW 12 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. *Share Social Work Journal*. Halaman 49-59.
- Badan Pusat Statistik Purwakarta. 2019. *Badan Pusat Statistik Purwakarta (Vol.6)*.
- Creswell, J. W. 2015. *Second Edition Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. In *Health Promotion Practice (2nd ed., Vol. 16)*. <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>.
- Fammy, R, Secillia & Nurasa, Heru D. 2018. Kondisi Kesetaraan Gender Dalam Promosi Jabatan Eselon II Perempuan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. (1).
- Khairunnisa, I. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah. 6, 81–91.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho dan Rahayu. 2018. *Implementation of Gender Mainstreaming Strategy through Improvement of Empowerment of Women Economic and Welfare Program in Lampung Province*. UNIVERSITAS LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG.
- Sugiyono, D. 2013. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sumar, Warni Tune, 2015. Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Wibisono, W. 2018. Studi Kebijakan Politik: Aktor dan Isu dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal Communitarian*, 1(1), 101-110.
- Yovi, E. Y. 2019. Status Ergonomi Pekerja Sektor Kehutanan di Indonesia: Kelelahan Fisik-Mental-Sosial, Kepuasan Kerja, Konsep Sumber Bahaya, dan Konsep Biaya Kecelakaan. *Ilmu Kehutanan* 13 (20), 137-150.
- Zulaiha, S. 2017. Urgensi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Inklusif Gender. *Terampil, Jurnal Pendidikan Dan Pernelajaran Dasar*, 4(2), 86-106.
- Jika sumber bacaan/referensi dari internet
- Hatta, M. 2004. Yang Terlarang dalam Berkari. <http://www.sdmlink.com/page/artikel/?act/detil/aid/42>